

BRIEF NOTES



RINGKASAN STUDI

Kajian Sosial Ekonomi Pengembangan Infrastruktur Permukiman (PIP) di Kawasan Pos Lintas Batas Negara Terpadu (PLBNT) Motamasin

Pembangunan Pos Lintas Batas Negara Terpadu (PLBNT) dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman (PIP) merupakan pengejawantahan nyata salah satu agenda prioritas dari sembilan agenda pembangunan (Nawacita) membangun Indonesia dari pinggiran, yaitu dengan mengubah wajah perbatasan negara menjadi kawasan yang maju dan berdaya saing. Pada tahun 2015, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaksanakan pengembangan infrastruktur permukiman kawasan perbatasan di kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), salah satunya di Motamasin, Kabupaten Malaka, NTT. Pada saat kajian ini dilakukan, pengembangan PLBNT dan PIP di Motamasin sudah mencapai tahap pertama dan akan berlanjut ke tahap kedua. Dalam rangka mendukung kegiatan tersebut, diperlukan informasi mengenai kondisi sosial ekonomi masyarakat serta potensi pemanfaatan program pengembangan di kawasan PLBNT. Informasi ini sangat diperlukan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pembangunan yang sedang berjalan serta rencana pengembangan program di masa yang akan datang. Oleh karena itu, kajian sosial ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan serta penghimpunan informasi mengenai potensi pemanfaatan program menjadi sangat mendesak untuk dilakukan.

KEY POINTS

1. PLBNT mengemban amanah mengubah wajah perbatasan negara menjadi kawasan yang maju dan berdaya saing.
2. Pembangunan dan pemanfaatan PLBNT harus memberdayakan masyarakat sekitarnya dalam mengantisipasi dampak lanjut dari keberadaan PLBNT.
3. Meskipun sudah ada PLBNT, masih ada upaya sebagian masyarakat tidak menghargai bahkan merasa dirugikan, sehingga perlu ditinjau ketentuan yang mempersulit mereka dalam melakukan hubungan-hubungan sosialnya.
4. Koordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan, dan pengikutsertaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program sesuai dengan kapasitas dan kondisinya sangat diperlukan agar PLBNT dan PIP memberi manfaat yang optimal bagi masyarakat.

PENDAHULUAN

Kajian ini dilakukan di empat (4) desa yang ada di sekitar kawasan PLBNT Motamasin, yang secara administratif berada dalam wilayah Kecamatan Kobalima (Desa Rainawe dan Desa Litamali) dan Kecamatan Kobalima Timur (Desa Alas Selatan dan Desa Kotabiru), Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Gambaran umum lokasi kajian tersebut, secara ringkas diilustrasikan pada gambar berikut.



Gambar 1. Infografis Wilayah Motamasin

Sumber: Pendataan Potensi Desa/Kelurahan 2011 dan 2014 (Podes 2011 dan 2014) dan Peta Administrasi Motamasin PUPR 2017, diolah oleh Lembaga Demografi FEB UI 2017

Wilayah kawasan PLBNT Motamasin ini umumnya merupakan dataran rendah, berada di tepi pantai, sebagian merupakan pegunungan. Secara umum, mata pencaharian utama masyarakat adalah pertanian, yaitu pertanian kebun dengan lahan tadah hujan. Sebagian adalah nelayan kecil dan pedagang ikan.

Pengetahuan dan Persepsi tentang PLBNT

Sekitar 77 persen responden mengetahui akan keberadaan PLBNT di Motamasin. Dari mereka yang mengetahui tersebut, persepsinya tentang PLBNT adalah sebagai berikut:

- Sejumlah 99 persen menyatakan setuju atas pernyataan "keberadaan Pos Lintas Batas Negara membuat saya

lebih bangga menjadi penduduk Indonesia" dan "Keberadaan Pos Lintas Batas Negara akan menarik pendatang baru untuk melintas".

- Berkisar dari 88 persen sampai 98 persen menyatakan setuju atas pernyataan "kawasan PLBNT akan menjadi lebih berkembang, menjadi ramai, lebih nyaman, lebih aman, lebih lancar, membuka peluang usaha dan memperluas kesempatan kerja, membuat harga kebutuhan sehari-hari lebih terjangkau, harga tanah meningkat, dan membuat layanan kesehatan dan pendidikan lebih meningkat".
- Meskipun banyak yang merespon secara positif, ada juga respon yang negatif.
- Hanya 58 persen saja responden yang setuju bahwa "keberadaan PLBN memperlancar proses perizinan perjalanan lintas batas negara". Mereka yang tidak setuju, antara lain justru karena aturan baru PLBNT tersebut akan mengganggu hubungan sosial dan adat mereka dengan masyarakat di Timor Leste.
- Sekitar 37 persen responden menyatakan bahwa anggota rumah tangga mereka pernah melintas batas dalam satu tahun terakhir (sebelum kajian dilakukan). Dari mereka yang pernah melintas batas dalam satu tahun terakhir, didapatkan bahwa kebanyakan (hampir 95%) melintas minimal satu bulan sekali.
- Sayangnya, sebagian masyarakat melintas batas menggunakan jalan/lintasan yang ilegal.
- Sebagian besar responden menyatakan bahwa, dibanding dengan Pos Lintas Batas Timor-Leste, PLBNT Motamasin lebih bagus dalam segala hal. Hal ini ditunjukkan dari empat (4) hal yang diakui lebih baik, yaitu urusan imigrasi (97%), bea cukai (97%), karantina (95%), dan keamanan (92%).

Pengetahuan dan Persepsi tentang Pengembangan Infrastruktur Permukiman (PIP) Air Minum

PIP Air Minum yang dibangun Kementerian PUPR ternyata cukup dikenal oleh masyarakat Motamasin. Dari 100 rumah tangga yang diwawancarai, lebih dari separuh, tepatnya 53 persen responden mengetahui ada pembangunan sarana penyediaan air minum yang dibangun mulai tahun 2015 oleh Kementerian PUPR di sekitar tempat tinggal mereka. Dari mereka yang mengetahui keberadaan PIP tersebut, berpersepsi sebagai berikut:

- Sekitar 87 persen setuju dengan pernyataan "keberadaan PIP Air Minum menjadikan lingkungannya lebih tenang".
- Sekitar 98 persen setuju dengan pernyataan "keberadaan PIP Air Minum menjadikan lingkungannya lebih nyaman".
- Namun, hanya ada 74 persen dari mereka yang bersedia membayar layanan air yang disediakan PIP Air Minum.

- Masalah air minum di Motamasin sudah lama dirasakan seperti umumnya dirasakan oleh mayoritas masyarakat di NTT.
- Mengatasi masalah air diharapkan menjadi sentral pemecahan masalah, tidak hanya untuk air minum, namun juga untuk menjawab tantangan pengembangan pertanian dan peternakan di Motamasin.

Pengetahuan dan Persepsi tentang Pengembangan Infrastruktur Permukiman (PIP) Pengelolaan Limbah Rumah Tangga

Yang dimaksud dengan limbah rumah tangga dalam kajian ini adalah limbah cair yang berasal dari kegiatan mandi, cuci dan kakus (MCK) rumah tangga. Dari 100 rumah tangga yang diwawancarai, hanya 44 persen responden yang mengetahui pembangunan pengelolaan limbah rumah tangga oleh Kementerian PUPR di sekitar tempat tinggal mereka. Persepsi mereka tentang PIP tersebut adalah sebagai berikut:

- Seluruh responden setuju kalau pengelolaan limbah rumah tangga sangat dibutuhkan sebagai tempat pembuangan tinja yang sehat, membuat masyarakat terbiasa menggunakan jamban, menjadikan lingkungan sehat, layak, dan bersih serta masyarakat setuju jika pemeliharaan sarana pengelolaan limbah rumah tangga menjadi tanggung jawabnya.
- Namun begitu, hanya 64 persen responden yang setuju dengan pernyataan "bersedia membayar layanan pengelolaan limbah rumah tangga".

Pengetahuan dan Persepsi tentang Pengembangan Infrastruktur Permukiman (PIP) Pengolahan Sampah

Hanya 15 persen responden yang mengetahui akan keberadaan PIP pengolahan sampah ini. Dari mereka yang mengetahui tersebut, persepsinya tentang PIP pengolahan sampah adalah sebagai berikut:

- Semua responden setuju kalau sistem pengolahan sampah sangat dibutuhkan, memudahkan masyarakat membuang sampah, membuat lingkungan lebih sehat dan nyaman, dan masyarakat setuju jika pemeliharaan PIP Persampahan menjadi tanggung jawabnya.
- Sekitar 98 persen responden yang setuju jika keberadaan PIP persampahan menjadikan lingkungannya lebih bersih.
- Sekitar 87 persen responden yang setuju dengan pernyataan "keberadaan PIP persampahan menjadikan responden tidak membuang sampah".
- Namun, hanya ada 74 persen responden yang bersedia membayar layanan pengelolaan sampah.

Pengetahuan dan Persepsi tentang Pengembangan Infrastruktur Permukiman (PIP) Jalan Lingkungan/Jembatan/Drainase

Terdapat sekitar 78 persen responden yang mengetahui ada pembangunan jalan lingkungan/jembatan/drainase yang dibangun mulai tahun 2015 oleh Kementerian PUPR di sekitar tempat tinggal mereka. Dari mereka yang mengetahui tersebut, persepsinya tentang PIP ini adalah sebagai berikut:

- Semua responden setuju kalau peningkatan jalan lingkungan/jembatan/drainase sangat dibutuhkan masyarakat, akan memperlancar akses ke wilayah lain, termasuk mempermudah akses ke fasilitas pendidikan dan kesehatan.
- Sebanyak 99 persen responden yang setuju dengan pernyataan "kalau peningkatan jalan lingkungan/jembatan/drainase membuat berkendara lebih nyaman termasuk untuk memperoleh kebutuhan sehari-hari.
- Sebanyak 97 persen responden setuju jika peningkatan jalan lingkungan/jembatan/drainase membuat perekonomian di lingkungannya berkembang.
- Namun mesti diingat, tidak semua (hanya 92 persen) responden yang setuju jika pemeliharaan jalan lingkungan/jembatan/drainase menjadi tanggung jawab masyarakat.

Isu Strategis Lain

Temuan lain terkait dengan pembangunan atau penyediaan infrastruktur yang telah disebutkan di atas, adalah munculnya beberapa masalah di lapangan yang dapat saja menghambat atau bahkan membuat PIP yang dibangun tersebut kurang efektif dan maksimal pemanfaatannya. Masalah yang dimaksud adalah terkait urusan koordinasi dan sosialisasi. Sosialisasi pembangunan PIP juga seharusnya lebih sistematis dan melibatkan anggota masyarakat yang lebih luas. Masyarakat lebih tahu apa yang mereka butuhkan secara spesifik, baik jumlah, lokasi, dan spesifikasi. Anggota masyarakat akan sangat rela jika mengetahui apa yang dikorbankan mempunyai manfaat yang besar untuk masyarakat banyak. Selain hal di atas, azas keadilan juga harus ditegakkan. Hal ini terutama dirasakan oleh masyarakat dalam penerapan ganti harta benda. Seharusnya penerapan ganti rugi tidak pandang bulu. Sudah selayaknya juga Kabupaten Malaka sebagai satu kesatuan, tidak hanya Motamasin saja, dibantu pusat untuk setara dengan daerah perbatasan lain.

Aspirasi Masyarakat terkait dengan Infrastruktur

Kajian ini juga mengungkap apa yang menjadi keinginan masyarakat dalam hal infrastruktur. Beberapa hal yang menjadi aspirasi masyarakat, adalah sebagai berikut:

- Kebutuhan sarana transportasi umum, baik terminal maupun angkutan umum (trayek).

- Sarana telekomunikasi: menara (*base transceiver station*) BTS untuk telekomunikasi seluler dan pos/jasa pengiriman.
- Kebutuhan sarana pendidikan, terutama gedung SMA/SMK, asrama guru/siswa dan perpustakaan.
- Kebutuhan sarana kesehatan seperti rumah sakit, tenaga kesehatan dan asramanya/rumahnya. Puskesmas memang tetap disebut walau sudah sudah tersedia beberapa puskesmas dan puskesmas pembantu di Motamasin, bahkan di Puskesmas Alas juga tersedia mess tenaga kesehatan dan menjadi salah satu aktivitas program Nusantara Sehat.
- Kebutuhan sarana sosial, yaitu rumah ibadah, balai desa, lapangan, dan poskamling. Namun menurut koordinasi Satker PUPR di Motamasin dengan Camat Kobalima lapangan sudah akan dibangun di Desa Rainawe Kecamatan Kobalima.
- Kebutuhan sarana air seperti irigasi dan waduk/bendungan.
- Kebutuhan sarana energi seperti listrik, PJU dan kebutuhan BBM (SPBU, LPG/minyak tanah).
- Kebutuhan sarana ekonomi, yang terbanyak disebut pasar tradisional, pasar induk/grosir, dan akses kredit. Peringkat berikutnya adalah penginapan/tempat istirahat, pasar wisata, *food court*, bangunan pengemasan produk, pasar swalayan. Perlu diketahui, di Motamasin sudah ada BRI Kobalima dan Unit Simpan Pinjam Desa dari Bank NTT di sekitar Kecamatan Kobalima.

PENUTUP

Keberadaan PLBNT, baik secara fisik maupun secara organisasi berupa SDM, aturan, prosedurnya, yang lebih rapi dan tertata, hendaknya dapat membawa banyak manfaat bagi masyarakat sekitarnya, terutama penduduk asli Motamasin. Karena itu, tidak cukup dengan membangun fisiknya tapi juga harus memberdayakan masyarakat sekitarnya dalam mengantisipasi dampak lanjut dari keberadaan PLBNT.

Dampak lanjut yang segera akan terlihat adalah meningkatnya mobilitas penduduk seharusnya dapat diantisipasi oleh masyarakat sekitarnya sebagai sebuah peluang dalam meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian mereka. Namun karena masyarakat asli

khususnya tidak memiliki SDM yang cukup, peran pemda dan stakeholder lainnya menjadi sangat penting dalam memberdayakan masyarakat sehingga dapat menangkap peluang yang terjadi.

Selain peluang ekonomi, kehadiran penduduk juga akan membuka hubungan sosial yang lebih luas dan beragam, terutama antara penduduk asli dengan penduduk pendatang. Hubungan sosial yang makin meluas dan meningkat ini perlu dikelola supaya meningkatkan rasa keindonesiaan, bukan sebaliknya menimbulkan gesekan-gesekan di tingkat lokal, baik karena agama maupun kesukuan.

Sebagai sebuah organisasi, PLBNT membawa tuntutan-tuntutan baru dalam hal lintas batas negara, khususnya di bidang keimigrasian. Tuntutan baru tersebut diwujudkan dalam serangkaian peraturan melintas batas bagi setiap warga. Dalam konteks Motamasin, penduduk asli yang bermukim di sekitar pos lintas batas, baik yang di wilayah Indonesia maupun di Timor Leste, pada dasarnya merupakan kerabat dekat dengan adat istiadat yang sama. Karena alasan tersebut, interaksi kedua kelompok ini cukup intens. Oleh karena itu, keberadaan pos lintas batas negara hendaknya tidak menghambat interaksi sosial tersebut.

Berkenaan dengan PIP pada masyarakat di sekitar PLBNT Motamasin, penelitian ini mencatat beberapa permasalahan antara lain: kurangnya koordinasi dan sosialisasi para pelaksana program kepada masyarakat dan institusi pemerintah lokal yang berdampak kepada efektivitas dan efisiensi program. Contoh konkret yang terjadi adalah pembangunan infrastruktur yang lokasinya dianggap kurang tepat, penyediaan infrastruktur yang tidak merata, kurangnya partisipasi masyarakat dan kurangnya rasa memiliki dari masyarakat terhadap infrastruktur yang dibangun. Contoh ini hendaknya mengingatkan para pelaksana program untuk senantiasa berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk menghindari hal tersebut, masyarakat hendaknya diikutsertakan dalam perencanaan dan pelaksanaan program, sesuai dengan kapasitasnya.

Penulis

Muda Saputra, DPSC, MSi.
(Lembaga Demografi FEB, Universitas Indonesia)

Editor

Endang Antarwati, S.E., M.S.E.
(Lembaga Demografi FEB, Universitas Indonesia)

LEMBAGA DEMOGRAFI

Gedung A | Gd. Nathanael Iskandar Lantai 2 dan 3
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, DEPOK 16424



TLP: +62 21 787 2911

FAX.: +62 21 7872909



info@ldfebui.org



@ldfebui



Lembaga Demografi
FEB UI



www.ldfebui.org